

EKSAMINASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1143/K/Pid/2004 TENTANG KASASI FAJRI ALIAS YUSUF PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI PALU



Oleh: CITRA HAPSARI (01400300)

Law

Dibuat: 2006-07-04 , dengan 3 file(s).

Keywords: Tindak Pidana Terorisme, Putusan Mahkamah Agung

Obyek penelitian ini adalah mengenai Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No 1143/K/Pid/2004 Tentang Kasasi Fajri alias Yusuf dalam kasus Tindak Pidana Terorisme Di Palu. Sebagaimana diketahui diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah Hakim. Hakim inilah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya. Penulis berpendapat bahwa semua aparat penegak hukum berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita hukum secara utuh.

Harus diakui bahwa diantara aparat penegak hukum yang lainya posisi Hakim adalah yang paling istimewa. Seperti halnya dalam kasus ini dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Fajri alias Yusuf selama 6 (enam) tahun karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu memberikan bantuan dan kemudahan dengan memberikan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam pasal 13 Perpu RI No 1 Tahun 2002 jo UU No 15 Tahun 2003 jo pasal 56 KUHP.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Fajri alias Yusuf tersebut sudah tepat atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode teoritik dan yuridis formal, yaitu dari data-data yang diperoleh penulis ingin mengetahui sejauh mana daya kerja hukum antara teori dan praktek, khususnya menyangkut kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara ini.

Melalui penelitian yang mendalam dan teliti didapatkan hasil bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara tidak boleh hanya bersikap legalistis saja, yang hanya terpaku pada UU atau sistem hukum acara demi mengejar kepastian hukum semata. Tetapi Hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan menerapkan hukum yang sosiologis yaitu memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa dan memberi rasa nyaman serta memuaskan para pihak yang bersengketa.

Untuk membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat mengakomodasi keinginan tersebut melalui pembentukan eksaminasi publik. Hal ini diharapkan bisa menekan timbulnya kasus-kasus besar yang merugikan Negara seperti tindak pidana terorisme

